

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurahman. 1983. *Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria*. Bandung : Alumni.
- Achmad Rubaie. 2007. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Malang : Bayumedia.
- Adrian Sutedi. 2008. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Arie Sukanthi Hutagalung. 2008. *Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Boedi Harsono. 2007. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta : Djambangan.
- Chaidir Ali. 1987. *Badan Hukum*. Bandung : Alumni.
- Chomzah, Ali Achmad. 2002. *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I dan II*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Imam Sutiknjo. 1990. *Politik Hukum Agraria*. Jogjakarta : Gajah Mada University Press.
- Oloan, Sitorus dan Sierrad, H.M.Zaki. 2006. *Hukum Agraria Di Indonesia Konsep Dasar Dan Implementasi*. Jogjakarta : Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- R.G. Kartasapoetra. 1986. *Masalah Pertanahan Di Indonesia*. Jakarta : PT Bina Aksara.
- Ramli Zein. 1995. *Hak Pengelolaan Dalam Undang-Undang PokokAgraria*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Rusmadi Murad. 2007. *Menyikapi Tabir Masalah Pertanahan*. Bandung : Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Urip Santoso. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta : Kencana.
- Yahya Harahap. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **Peraturan Perundang- Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang- Undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang- Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah Negara.

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah

Peraturan Pemerintah No 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah No. 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah.

Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 tentang Perubahan Hak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan Atau Hak Pakai Dan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Pakai.

Keputusan Menteri ESDM No. 143 K/20/MEM/2019 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional Tahun 2019 sampai dengan 2038.

## **Website**

<https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/PeraturanPerundangan/UndangUndang/pager/1658/page/4> diakses pada tanggal 1 oktober 2019, pukul 17:00 wib

<https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/PeraturanPerundangan/KeputusanMenteriNegara> diakses pada tanggal 2 oktober 2019, pukul 20:00 wib

<http://widhihandoko.com/?p=565> diakses pada tanggal 8 Oktober 2019, pukul 23:00 wib.

<http://zriefmaronie.blogspot.co.id/2014/05/bekerjanyahukumdalamasyarakat.html>.  
Diakses pada tanggal 15 Oktober 2019, pukul 21:32 wib.

<https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Standar-Prosedur> diakses pada tanggal 1 november 2019, pukul 16:00 wib

<http://eprints.uny.ac.id/23570/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 5 november 2019, pukul 20:00 wib

<https://media.neliti.com/media/publications/161499-ID-analisis-yuridisperubahan-hak-atas-tana.pdf> diakses pada tanggal 10 november 2019, pukul 13:00 wib

